

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah serta berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi, untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya. Pelaksanaan otonomi setiap daerah diharapkan harus mampu mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu diperlukan regulasi yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai sektor (Oktiani, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Abdul, 2004).

Menurut Saputra, dkk (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan dari segi keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program otonomi yang terdapat di daerahnya. Keberhasilan sebuah otonomi daerah dapat dipengaruhi oleh naik atau menurunnya pendapatan asli daerah tersebut. Berjalannya otonomi yang terdapat di sebuah wilayah menjadi lebih maksimal karena adanya sumber pendapatan asli daerah. Jika penerimaan yang terdapat pada sebuah wilayah mengalami peningkatan artinya pembangunan yang terdapat di wilayah tersebut juga lebih cepat dan kesejahteraan penduduknya dapat dibantu oleh pemerintah.

Pesawaran merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang masih memiliki masalah ketimpangan Fiskal dalam sumber pendanaan dan pendapatan asli daerahnya. Ketimpangan Fiskal dalam hal ini yaitu Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di urutan ke empatbelas diantara kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Kondisi wilayah yang strategis dan dekat dengan ibukota Provinsi Lampung ternyata tidak mendorong laju pertumbuhan di Kabupaten Pesawaran. Selain itu, ketersediaan Sarana dan pengembangan infrastruktur masih belum merata. Dampak dari pertumbuhan ekonomi akan berpengaruh pada pendapatan daerah. Kabupaten Pesawaran memiliki besaran PDRB di bawah jauh dari Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan naiknya tingkat pendapatan per kapita penduduk setiap tahunnya, sehingga semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah (Weliza dkk,2022)

Indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan retribusi daerah dan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah dan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah, yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan retribusi daerah dan pajak daerah melalui upaya-upaya atau kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu (Oktiani, 2021).

Pemerintah daerah berperan dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Jadi, Ciri utama yang menentukan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat diharapkan semakin kecil, dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana

penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut ini disajikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2013 sampai dengan 2022:

**Tabel 1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesawaran tahun 2013-2022**

TAHUN	PENDAPATAN (Rp)	BELANJA (Rp)	SURPLUS/(DEFISIT) (Rp)
2013	782.447.803.025,83	822.431.621.675	(39.983.818.649,1)
2014	913.575.380.529,71	930.780.038.473	(17.204.657.943,2)
2015	948.857.310.023,80	928.741.216.823	20.116.093.200,8
2016	1.186.433.984.696,55	1.083.074.573.331	103.359.411.365,5
2017	1.328.405.995.757,77	1.090.464.524.119	237.941.471.638,7
2018	1.285.923.925.073,54	1.128.973.189.958,37	156.950.735.115,1
2019	1.279.708.276.529,17	1.035.991.819.320,91	243.716.457.208,2
2020	1.275.131.350.807,13	1.051.732.071.720,42	223.399.279.086,7
2021	1.236.502.482.314,95	1.230.468.597.291,40	6.033.885.023,55
2022	1.222.558.571.198,16	1.263.091.522.281	(40.532.951.082,8)

Sumber: Portal Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu) 2023.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2013 sampai tahun 2022 mengalami fluktuatif. Apabila dilihat total pendapatan kabupaten Pesawaran tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan tahun 2017 mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 mengalami penurunan pendapatan. Kemudian, jika dilihat total belanja kabupaten pesawaran tahun 2013-2022 mengalami kenaikan. Jika dilihat dari selisish antara total pendapatan dan belanja kabupaten Pesawaran tahun 2013, 2014 dan tahun 2022 mengalami defisit. Defisit anggaran merupakan selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja yang nilainya negatif. Hal ini berarti anggaran pendapatan nilainya lebih kecil dari anggaran belanja.

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja, *human resource*, di samping sumber faktor produksi skill (Rosyidi, 2002). Apabila jumlah penduduk sebagai sumber daya manusia lebih produktif dalam mengembangkan produksi barang dan jasa maka akan terjadi peningkatan dalam transaksi jual beli. Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses dan kegiatan dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan

kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Arsyad, 1999). Keberhasilan perekonomian dapat dilihat dari adanya penduduk, yang mana penduduk merupakan penggerak dari sektor-sektor perekonomian. Sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Pesawaran sendiri meliputi perdagangan besar dan eceran, sektor industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sektor tanaman hortikultura, sektor konstruksi, sektor perkebunan dan sektor perikanan (Weliza dkk, 2022). Pengaruh Jumlah Penduduk serta mutu penduduk suatu daerah merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standar hidup suatu daerah.

Meningkatnya aktivitas penduduk Kabupaten Pesawaran akan menyebabkan terjadinya kenaikan terhadap permintaan barang dan jasa, sehingga permintaan yang berlebihan ini akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi akan memicu kondisi perekonomian yang buruk jika tidak ada pengendalian yang dilakukan. Tingkat inflasi yang aman adalah kurang dari 10% dan jika melebihi 25% akan memicu adanya kenaikan harga dari barang ataupun jasa dan juga menyebabkan nilai tukar rupiah menurun (Oktiani, 2021).

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh ketidaksinkronya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2013). Kebanyakan model inflasi menekankan dampak kenaikan upah pada jumlah uang beredar sebagai penyebab utamanya, dan biasanya dikatakan bahwa ada dua jalur sebab antara jumlah uang beredar atau inflasi karena jumlah uang beredar yang berlebihan. Tingginya inflasi seperti kondisi saat ini akan berakibat terhadap rendahnya daya beli masyarakat, dan sebaliknya, jika kondisi inflasi rendah akan berdampak pada pendapatan masyarakat pula (Darajat, 2022). Dengan demikian akan berdampak terhadap peningkatan PAD pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurrijah (2021) dimana penelitiannya menunjukkan retribusi daerah dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan sedangkan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini berarti inflasi tidak dapat lepas dari adanya peningkatan upah kerja atau uang beredar di masyarakat.

Semakin tinggi uang beredar akan semakin tinggi peningkatan inflasi dan akan semakin tinggi perolehan pendapatan asli daerah di pemerintahan daerah. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Darajat (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini berarti, jumlah penduduk yang besar pada suatu wilayah belum tentu akan membuat pendapatan asli daerah meningkat sebab tidak semua kalangan masyarakat produktif di kisaran umur lima belas hingga umur enam puluh empat mempunyai kerja serta memiliki pendapatan yang pasti. Berdasarkan penelitian yang berbeda di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Retribusi Daerah, Inflasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013-2022 di Kabupaten Pesawaran?
- b. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013-2022?
- c. Bagaimana pengaruh Peningkatan Penduduk selama 10 tahun mulai tahun 2013-2022 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran?
- d. Bagaimana pengaruh retribusi daerah, inflasi dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesawaran?

## **1.3. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran
- b. Menganalisis pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran.

- c. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran.
- d. Menganalisis pengaruh retribusi daerah, inflasi dan jumlah penduduk secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pesawaran.

#### **1.4. Kontribusi**

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan suatu kewajiban agar dapat memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan. Penelitian ini menjadi permulaan saya dalam memasuki dunia kerja dan diharapkan penelitian ini mampu memberikan penjelasan dan menjadi materi masukan terhadap pihak yang melaksanakan penelitian serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait ilmu yang sudah dipelajari selama masa perkuliahan dan mengimplementasikan kedalam penelitian.

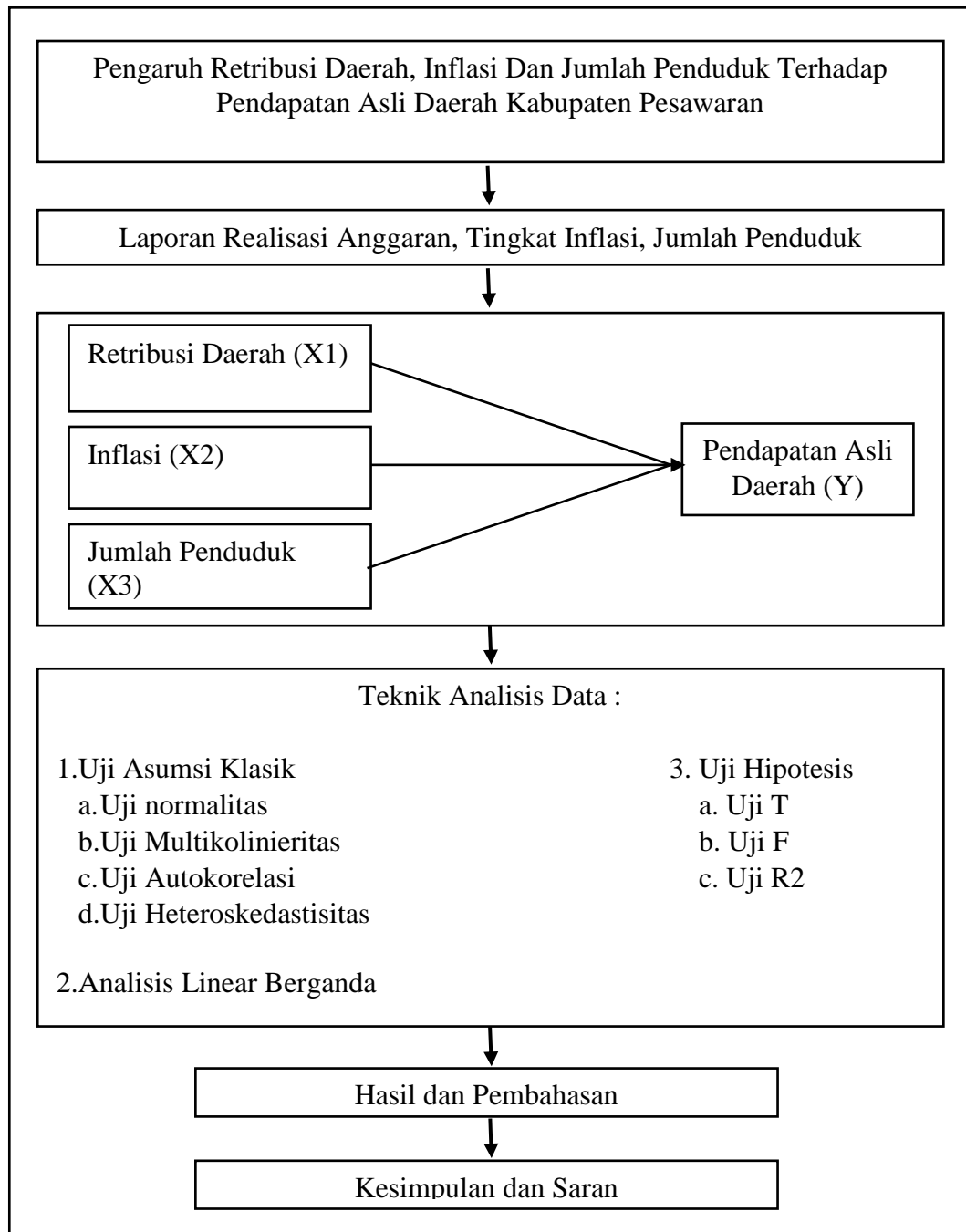
- b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan datang, terutama yang terkait dengan permasalahan yang diulas dalam penelitian ini.

- c. Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Kabupaten Pesawaran dalam upaya mengambil kebijakan dalam hal ini meningkatkan pendapatan perkapita dalam memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai masukan kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran agar mengetahui kondisi pendapatan, jumlah investasi seberapa besar pengeluaran pendapatan asli daerah.

### 1.5. Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka pemikiran pengaruh retribusi daerah, inflasi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah kabupaten pesawaran

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep Teori

#### 2.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan merupakan faktor terpenting dan penentu utama (*main determinan*) dari konsumsi. Teori yang dikemukakan oleh Keynes dinamakan *absolute income hypothesis* atau hipotesis pendapatan mutlak didasarkan atas hukum psikologis yang mendasar tentang konsumsi yang menyatakan apabila pendapatan mengalami kenaikan maka konsumsi juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan asli daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Darise, 2009).

Berdasarkan UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeloan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Djaenuri (2012) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 1 tahun 2022 yaitu:



1. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
2. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya *budgetingnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

### 2.4.2 Retribusi Daerah

Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give* (Boby dkk, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi terbagi menjadi tiga golongan antara lain yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati dan dirasakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Usaha. Retribusi Jasa Umum meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Retribusi Pelayanan Pasar.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dijelaskan sebagai pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Berikut jenis-jenis Retribusi usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
2. Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan.
3. Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Retribusi Terminal.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.
7. Retribusi Rumah Potong Hewan.
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
10. Retribusi Penyeberangan di Air.
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah baik kepada Orang Pribadi dan Badan, yang ditujukan untuk pengaturan dan pengawasan atas aktivitas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
3. Retribusi Izin Gangguan.
4. Retribusi Izin Trayek.
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

### **2.4.3 Inflasi**

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus dalam waktu yang lama. Kaitan inflasi dengan mekanisme pasar yaitu diakibatkan oleh beberapa penyebab diantaranya peningkatan konsumsi penduduk atau pendistribusian barang kurang lancar. Pada sisi lain inflasi adalah penurunan nilai mata uang secara berkelanjutan. Inflasi merupakan proses dari suatu kejadian bukan naik atau turunnya secara tingkat harga. Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga terjadi secara berkelanjutan dan saling mempengaruhi (Halim, 2018).

Menurut Sirajuddin (2012) Inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit ekonomi yang sering muncul dan dialami oleh hampir semua negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa memerangi laju inflasi merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan ekonomi yang dikenal dengan istilah stabilitas harga. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karna secara riil tingkat pendapatannya juga menurun, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara riil pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga.

Menurut Karya dkk, (2017) Inflasi merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana meningkatnya biaya pada tiap jenis barang yang terjadi secara berkelanjutan yang terdapat pada sebuah perekonomian negara. Tingginya inflasi mampu mengguncang perekonomian yang ada pada sebuah negara. Dimana inflasi tertinggi di Indonesia pernah terjadi pada tahun 1965-1966 hingga mencapai 650% yang mengakibatkan munculnya suatu gejala di masyarakat untuk menuntut adanya harga barang yang diturunkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fitri (2021) inflasi merupakan suatu permasalahan ekonomi yang terdapat pada suatu daerah atau negara yang

menunjukkan adanya kenaikan harga-harga barang secara umum yang terjadi secara berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Jika hanya satu ataupun dua macam harga barang yang naik belum bisa dinamakan inflasi melainkan jika naiknya inflasi tersebut mampu menyebabkan naiknya harga terhadap barang lain. Kenaikan barang untuk sementara juga tidak dianggap inflasi. Menurut Sukirno (2016) jika dilihat dari sumber penyebab terjadinya suatu inflasi, inflasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis diantaranya:

- a. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*), inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa pengeluaran ini akan menimbulkan inflasi.
- b. Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*), inflasi ini juga berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjaannya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.
- c. Inflasi diimpor, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi akan terjadi apabila barang-barang diimpor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Darajat (2022) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu:

- a. Tingkat pengeluaran agregat melebihi kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa, tentunya akan memicu kenaikan yang dapat melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tingkat pengeluaran agregat adalah pengeluaran keseluruhan perusahaan. Apabila pengeluaran total perusahaan melebihi kemampuannya dalam

menghasilkan barang dan jasa, tentunya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan tersebut.

- b. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Seringkali pekerja atau karyawan perusahaan melakukan demo menuntut kenaikan upah. Adanya kenaikan upah karyawan akan menyebabkan biaya produksi barang dan jasa juga meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan harga barang dan jasa tersebut.
- c. Kenaikan harga barang impor. Kenaikan harga barang dan impor akan membawa pengaruh terhadap harga barang dalam negeri, terlebih lagi apabila barang impor tersebut digunakan sebagai faktor produksi (bahan mentah) untuk memproduksi barang dalam negeri.
- d. Penambahan penawaran uang dengan cara mencetak uang baru. Apabila uang yang beredar banyak, maka nilai uang akan turun, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.
- e. Kekacauan politik dan ekonomi. Hal ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada tahun 1998. Akibat kekacauan politik dan ekonomi tahun 1998 tersebut, angka inflasi di Indonesia mencapai 70%. (Badan Pusat Statistik, 2014).

Menurut Prawoto (2019) Banyak cara negara menyelesaikan inflasi, dapat berbeda-beda sebab pemicu terjadinya pada tiap-tiap negara tidaklah sama. Metode dalam mengatasinya bisa dilaksanakan dengan menerapkan suatu kebijakan diantaranya:

- a. Kebijakan Moneter

Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk lebih fokus pada total peredaran uang. Inflasi dikendalikan oleh Bank Sentral dengan cara meningkatkan cadangan minimum agar jumlah uang yang beredar menjadi lebih kecil sehingga tingkat inflasi mampu untuk ditekan. Bank Indonesia (BI) mengelola inflasi saat ini melalui metode pengelolaan yang disebut Inflation Targeting Framework (ITF) yang menentukan tingkat suku bunga BI *Rate* yang ditetapkan setiap awal bulan.

- b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi segi pengeluaran negara dan pajak yang secara langsung bisa mempengaruhi suatu harga, terkait peraturan mengenai pengeluaran pemerintahan negara, mengurangi permintaan total dan menekan laju inflasi merupakan kebijakan fiskal yang diterapkan.

c. Kebijakan yang berhubungan dengan output

Total output yang selalu naik dapat dicapai karena ada sebuah kebijakan yang mampu membuat bea masuk turun yang mengakibatkan biaya impor meningkat dan biaya barang jadi menurun. Sehingga naiknya output mampu memperlambat lajunya Inflasi. Operasi pasar terbuka adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam jangka pendek yaitu lewat lembaga pangan (BULOG) agar bisa menyediakan barang-barang kebutuhan yang ada.

d. Kebijakan Penetapan Harga dan *Indexing*

Terjadinya kebijakan ini sebab penentuan biaya yang tinggi untuk harga produk tertentu dan indikator ongkos untuk upah dan gaji.

#### **2.4.4 Jumlah Penduduk**

Pengaruh Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Rasyid (2017) penduduk adalah orang-orang di lingkungan sebagai individu, sebuah keluarga, suatu kelompok atau kumpulan masyarakat yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam batas bagian negara dalam jangka waktu tertentu. Penduduk merupakan sesuatu yang berhubungan dengan banyaknya, identitas, perkembangan, penyebaran, perpindahan, kemampuan, keadaan kesejahteraan yang meliputi segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ruang lingkup kependudukan.

Menurut Bidarti (2020) penduduk suatu negara maupun wilayah dapat diartikan kedalam dua jenis yaitu mereka yang bermukim di sebuah wilayah dan mereka yang berdasarkan norma mempunyai hak untuk bermukim di sebuah wilayah. Jumlah penduduk pada tiap daerah tidaklah tetap tetapi akan selalu

berubah bisa meningkat ataupun menurun seiring dengan waktu. Penambahan penduduk dapat terjadi sebab terjadinya angka kelahiran dan terjadinya kematian yang tidak seimbang sebab tingginya tingkat fertilitas melebihi tingkat mortalitas. Banyaknya jumlah penduduk juga disebabkan oleh selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah.

Berdasarkan definisi tentang jumlah penduduk tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasanya jumlah penduduk yaitu sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah yang ada pada sebuah negara dalam periode akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara apabila dibarengi oleh penduduk yang produktif, dengan demikian mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh pemerintah. Menurut Mulyadi (2017) komponen pertumbuhan penduduk dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Fertilitas (kelahiran) adalah kemampuan seorang wanita dalam melahirkan jumlah bayi hidup. Dalam penafsirannya orang cenderung menyamakan konsep fertilitas dengan fekunditas sedangkan fertilitas adalah kemampuan biologis seorang wanita untuk melahirkan bayi hidup. Sedangkan fekunditas adalah seseorang yang tidak dapat mempunyai keturunan atau dikenal dengan istilah kemandulan.
- b. Mortalitas (Kematian) adalah aspek kependudukan yang sangat penting dalam merancang suatu program di bidang kesehatan. Kematian adalah suatu keadaan dimana hilangnya semua tanda kehidupan secara lama yang bisa kapan saja terjadi sesudah terjadinya kehidupan yang lahir.
- c. Migrasi adalah berpindahnya suatu masyarakat pada sebuah tempat ketempat lain. Penduduk yang datang ke wilayah yang baru dinamakan dengan imigran. Sedangkan untuk penduduk yang pindah ke wilayah yang baru dinamakan dengan emigran.

Negara yang sedang berkembang mengalami ledakan jumlah penduduk, termasuk Indonesia yang akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Widarjono, 1998 ).



Berdasarkan hasil Survei *The results of National Labor Force*, yang terdapat pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesawaran 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Pesawaran mencapai 340.397 jiwa. Jumlah penduduk usia kerja dibagi menjadi penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2021 jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 222.683 jiwa, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,42%, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,19%. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pesawaran menunjukkan trend yang positif, terbukti dari adanya penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 4.64% di tahun 2020 menurun sebesar 0,45% di tahun 2021. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesawaran tahun 2021 menjadi 4.19 %. Dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi maka penduduk Pesawaran dapat dikatakan produktif, dengan demikian mereka mampu membayar pajak atau retribusi yang dipungut oleh pemerintah yang akan berpengaruh pada besarnya PAD (Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 2022).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

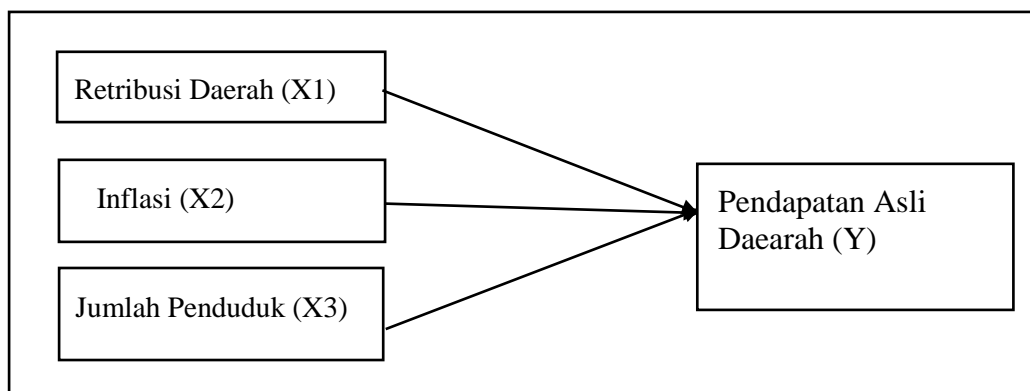
No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1.	Susanto Iwan (2014)	Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012)	PDRB Konstan mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Malang, karena PDRB Konstan secara regional atau daerah telah ditetapkan 9 subsektor dan subsektor tersebut merupakan penggerak ekonomi, semakin PDRB Konstan meningkatkan pertahunnya menggambarkan bahwa perkembangan ekonomi semakin baik dan peran masyarakat untuk membayar pendapatan daerah juga semakin meningkat, sebab pendapatan asli daerah Kota Malang terdapat 4 unsur yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain daerah yang sah. jumlah penduduk mempunyai hubungan positif karena Kota Malang kebanyakan pendatang untuk aktifitas kuliah, sehingga mahasiswa memerlukan biaya hidup untuk kuliah selama 4 (empat) tahun maka peredaran uang di Kota Malang mengalami peningkatan untuk kegiatan produksi barang dan jasa, secara tidak langsung atau langsung akan berdampak terhadap perolehan pajak dan retribusi karena yang disebabkan adanya aktifitas ekonomi didalam masyarakat pada pola konsumsi barang dan jasa
2.	Mega Ersita, Inggriani Elim (2016)	Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara	Kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2011 sampai 2014 mengalami perkembangan sampai 8 %. Kemudian pada tahun 2013 sampai 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami perkembangan lagi sebesar 8 % , tetapi pada tahun 2015 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 9 % hal ini disebabkan menurunnya penerimaan retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. Jika dilihat dari hasil presentase maka rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah dikatakan Sedang karena hanya mencapai 26,10 %.

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
3.	Oktiani Ariska (2021)	Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan	Secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan inflasi berpengaruhnya tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Secara simultan variabel jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.
4.	Darajat Zaqia (2022)	Pengaruh Inflasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Majene	Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene. Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene
5.	Nurrijah (2021)	Analisis Pengaruh Retribusi Daerah, Inflasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Aceh Barat	Retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat. Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat. Jumlah penduduk berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Barat
6.	Damanik Darwin, Pawan Darasa Panjaitan (2022)	Pengaruh Retribusi Daerah dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar	Secara parsial, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Pematangsiantar sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kota Pematangsiantar

### 2.3 Model Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, yang bertujuan untuk meneliti suatu populasi atau sampel, data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, analisis data sifatnya statistik/kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditentukan.

Sugiyono (2008) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan kongkit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan menggunakan analisis statistik. Model penelitian ini adalah retribusi daerah, inflasi dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah.



Gambar 2. Model Penelitian

### 2.4 Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi retribusi daerah sendiri merupakan tingkat sumbangan retribusi daerah terhadap PAD. Retribusi daerah sudah bisa dikatakan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ketika hasil akhir perhitungan mencapai persentase diatas 40% (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006). Jika hasil akhir sudah memenuhi kriteria tersebut baru bisa dikatakan kontribusi berperan dalam peningkatan pendapatan asli daerah (Mais dan Yuniara, 2021).

Analisis kontribusi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan dari penerimaan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pesawaran. Semakin besar nilai kontribusinya menunjukkan semakin besar pula peranan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Mais dan Yuniara, 2021). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurriyah (2021) Retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Maka hipotesis yang dapat diambil yaitu

***H1: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.***

#### **2.4.2 Pengaruh Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Tingkat inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum, Inflasi menyebabkan terjadinya efek substitusi. Konsumen akan mengurangi pembelian terhadap barang-barang yang harganya relatif mahal dan menambah pengeluaran konsumsi terhadap barang-barang yang harga relatif murah. Adanya inflasi berarti harga semua barang mengalami kenaikan dan ini akan menimbulkan efek substitusi antara pengeluaran konsumsi dan tabungan. Kenaikan tingkat harga umum tidaklah berarti bahwa kenaikan harga barang terjadi secara proporsional. Hal ini mendorong konsumen untuk mengalihkan konsumsinya dari barang yang satu kepada barang lainnya. Inflasi yang tinggi akan melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap produksi dalam negeri yang akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai mata uang nasional (Guritno, 1998).

***H2: Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah***

#### **2.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Apabila suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin. Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita *over population*, maka penduduk

dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya seefisien mungkin. Namun demikian karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orangpun menjadi kecil (Rosyidi, 2012).

***H3: Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.***

#### **2.4.4 Pengaruh retribusi daerah, inflasi dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Menurut hasil penelitian Damanik dan Pandjaitan (2022) bahwa Pengaruh Retribusi Daerah itu sendiri sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah karena retribusi daerah salah satu sumber dalam pendapatan daerah selain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hal ini berarti, naiknya penerimaan Retribusi Daerah di Kota Pematangsiantar menyebabkan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan.

Adanya inflasi berarti harga semua barang mengalami kenaikan dan ini akan menimbulkan efek substitusi antara pengeluaran konsumsi dan tabungan. Menurut Susanto (2014) inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa mengalami peningkatan secara menyeluruh yang disebabkan permintaan konsumen atas dasar barang dan jasa meningkat, pengaruhnya ke daerah akan mengalami peningkatan jika dilihat dari segi pendapatan asli daerah karena secara langsung barang dan jasa dikenakan pajak konsumen, adanya pajak itulah pendapatan asli daerah kota Malang mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil penelitian Oktiani (2021) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka pendapatan asli daerah (PAD) semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menunjukkan adanya hubungan jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah.

***H4: Retribusi Daerah, Inflasi dan Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.***